

DETERMINAN BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA

Afifah Putri Salamah¹, Maria², Rosy Armaini^{3*}

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

E-mail: afifahpsall@gmail.com¹⁾
mariamardjuki@polsri.ac.id²⁾
rosyarmaini@polsri.ac.id^{3*)}

Abstrak

Belanja modal berperan penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, dan SiLPA terhadap belanja modal secara parsial dan simultan. Populasi terdiri dari 16 provinsi di Sumatera dan Jawa selama 2018–2022, dengan data sekunder dari LKPD audited BPK RI. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa hanya PAD yang berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, sedangkan secara simultan semua variabel berpengaruh. Temuan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD. Keterbatasan penelitian terletak pada data yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria populasi.

Kata kunci: Belanja Modal, DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, SiLPA.

Abstract

This research aims to determine the influence of General Allocation Funds, Original Regional Income, Receiving costs, and Remaining Budget Financing on Modal Expenditures in the provinces of Sumatera and Java partially and simultaneously. This research uses a quantitative approach covering all 16 provinces in Sumatra and Java from 2018-2022. Data obtained from audited LKPD obtained from the BPK RI website. The results of this research show that ORI partially influences capital expenditure. Meanwhile, GAF, financing revenues and Remaining Budget Financing do not partially influence capital expenditure. GAF, ORI, financing revenues and Remaining Budget Financing simultaneously influence capital expenditure. These findings contribute to regional governments paying more attention to the factors that influence capital expenditure in their respective regions. The existence of data that does not meet the criteria means that the research cannot describe the population as a whole.

Keywords: Capital Expenditures, GAF, ORI, Financing Revenue, Remaining Budget Financing.



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

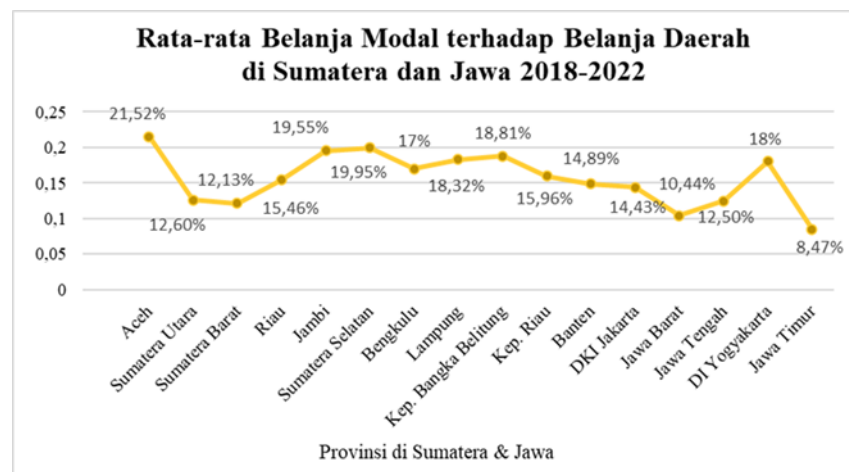
PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengontrol sendiri urusan pemerintahan dan mementingkan masyarakat sekitar didalam sistem NKRI (UU No. 23 Tahun 2014). Daerah memiliki otoritas untuk mengalokasikan dana untuk belanja modal, dengan tetap mematuhi kriteria kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan (Zulkifli et al., 2024). Pemerintah mengharapkan desentralisasi fiskal dapat mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang terdapat di wilayah tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.. Upaya intensifikasi ini sangat jelas dimasukkan dalam APBD sebagai bagian dari perencanaan pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah (Asih Setya Ningrum et al., 2024). Ketimpangan fiskal antar-daerah dapat terjadi apabila adanya perbedaan kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintah. Upaya pemerintah dalam

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

menangani hal ini dengan memberikan secara merata dana APBN untuk pelaksanaan desentralisasi (Prayitno et al., 2024).

Sumatera dan Jawa di dukung mempunyai kesetaraan didalam segi membangun jika dilihat dari kemajuan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di provinsi di Sumatera dan Jawa berkembang sangat pesat dibandingkan dengan pulau pulau lain. Hal itu dikarenakan adanya bangunan infrastruktur, sarana prasarana industri yang terbangun merata ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menandakan belanja pemodalana terserap dengan baik. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan misi otonomi daerah, pemda bertanggung jawab dalam berbagai aspek ekonomi, yang mencakup penyediaan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Disamping itu, PemDa turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menarik investasi dan meningkatkan ekspor (Kencana et al., 2022). Besarnya manfaat yang diberi pada ketersediaan infrastruktur publik membuat belanja pemodalana dijadikan perhatian utama didalam permasalahan.



Gambar 1. Realisasi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah 2018-2022
Sumber : *e-ppid.bpk.go.id*, 2024

Didasarkan gambar diatas dilihat jika alokasi belanja pemodalana buat Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2018-2022 masih rendah ataupun belum optimal. Hal ini dibuktikan jika rerata pengalokasian belanja pemodalana Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2018-2022 hanya sekitar 15,81%. Sesuai dengan (PP No. 2 Tahun 2015 mengenai RPJMN, 2015) secara keseluruhan jumlah belanja pemodalana provinsi yang mengalokasikan didalam APBD paling sedikit 30% dari belanja daerah, sementara rerata belanja modal di provinsi di Sumatera dan Jawa hanya sekitar 15,81%. Hal ini ditunjukkan jika pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa masih sedikit memakai belanja modal dari belanjanya daerahnya.

Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, SiLPA, serta Belanja Modal. Diharapkan hasil dalam kajian ini dapat memberikan wawasan baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah provinsi di Sumatera dan Jawa, dalam upaya meningkatkan realisasi belanja modal.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

**Tabel 1. DAU setiap Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2018 s.d. 2022
(dalam jutaan Rupiah)**

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	2.060	2.322	1.956	1.945	1.941
Sumatera Utara	2.629	2.713	42	2.463	2.432
Sumatera Barat	2.014	2.076	1.891	1.887	1.877
Riau	1.465	1.548	1.432	1.455	1.452
Jambi	1.399	1.433	1.288	1.284	1.280
Sumatera Selatan	1.697	1.743	1.568	1.563	1.563
Bengkulu	1.300	1.334	1.219	1.213	1.210
Lampung	1.854	1.906	1.732	1.726	1.719
Kep. Babel	1.018	1.046	942	939	940
Kep. Riau	1.150	1.190	1.099	1.092	1.092
Banten	1.140	1.072	1.042	1.070	1.070
DKI Jakarta	0	0	0	0	0
Jawa Barat	3.023	3.212	2.964	3.007	2.981
Jawa Tengah	3.652	3.784	3.438	3.432	3.435
DI Yogyakarta	1.314	1.351	1.227	1.224	1.218
Jawa Timur	3.813	3.998	3.662	3.650	3.596
Rata-rata	2.103	2.183	1.835	1.998	1.989

Sumber : e-ppid.bpk.go.id, 2024

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi setiap tahunnya terhadap DAU di seluruh Provinsi yang ada di Sumatera dan Jawa kecuali DKI Jakarta karena DKI Jakarta tidak memiliki DAU. Adanya dampak pandemi *Covid-19* menyebabkan perolehan DAU di tahun 2020 mengalami penurunan yang menyabkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pengeluaran untuk belanja modal menggambarkan sebuah strategi untuk jangka panjang dan alokasi dana untuk aset tetap. Dukungan keuangan untuk belanja modal negara dapat membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pelayanan umum di daerah yang otonom. Maka dari itu, pemda harus memberikan perhatian khusus pada belanja modal sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada Masyarakat (Kuntari et al., 2019). Artinya Belanja modal memiliki peran yang krusial dalam mengelola pelayanan publik dan membangun infrastruktur inti di suatu daerah. Adanya infrastruktur yang memadai di daerah tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat secara signifikan.

**Tabel 2. Belanja Modal setiap Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun 2018 s.d. 2022
(dalam jutaan Rupiah)**

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	2.503	3.162	1.755	2.199	2.868
Sumut	1.564	1.249	1.497	1.141	1.775
Sumbar	1.099	1.062	736	666	941
Riau	1.046	1.161	919	1.018	1.508
Jambi	784	866	642	449	906
Sumsel	1.537	1.606	1.664	1.836	1.536

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Bengkulu	618	741	417	324	417
Lampung	1.729	1.014	752	849	1.025
Kep. Babel	3.153	4.412	436	428	354
Kep. Riau	620	633	586	338	552
Banten	1.362	1.379	994	1.297	1.660
DKI Jakarta	14.118	11.045	3.173	6.865	8.808
Jabar	3.145	2.530	1.672	2.045	2.419
Jateng	1.681	2.099	996	1.447	1.713
DIY	1.132	1.035	940	654	704
Jatim	2.840	2.770	1.904	1.969	2.505
Rata-rata	2.559	2.424	1.319	1.597	1.982

Sumber : *e-ppid.bpk.go.id*, 2024

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan nilai belanja modal pada seluruh Provinsi di Sumatera dan Jawa periode 2018 s.d. 2022 mengalami fluktuasi, di tahun 2018 s.d. 2019 mengalami peningkatan, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat krusial bagi pemda setempat dalam memaksimalkan penggunaan sumber-sumber ekonomi lokal untuk mengelola wilayahnya (Maria et al., 2021).

Dana Alokasi Umum

Merujuk pada (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara PemPus dan PemDa, 2004) DAU adalah dana yang sumber utamanya dari APBN, yang pengalokasiannya untuk memastikan keseimbangan keuangan antar-daerah, guna mendukung daerah dalam memenuhi kebutuhan terkait pelaksanaan desentralisasi. Studi yang dilakukan oleh (Dinah & Darsono, 2023) mengungkapkan bahwa DAU terbukti memberikan dampak yang berarti terhadap alokasi belanja modal karena pemerintah pusat tetap mengalokasikan minimal 25% dari dana transfer kepada pemda setempat untuk penyebaran keuangan. Dengan pendanaan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap wilayah memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Penelitian lainnya oleh (Pradita, 2021) menyatakan bahwa DAU memberikan dampak positif terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa peningkatan jumlah DAU yang diterima oleh daerah akan diikuti dengan peningkatan dalam belanja modal yang dilakukan.

H1: DAU berpengaruh signifikan pada belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah

Merujuk pada (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara PemPus dan PemDa, 2004) PAD adalah pendapatan yang diterima oleh daerah melalui pemungutan yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022) menyatakan bahwa PAD berdampak positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat antara tahun 2019-2021. Hal tersebut menggambarkan bahwa PAD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, mendukung pelayanan publik dan infrastruktur, serta mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi daerahnya Pada penelitian (Pika et al., 2018) pengaruh positif PAD terhadap realisasi belanja modal di Kab. dan

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Kota se-Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa PAD yang tinggi berperan penting dalam pembangunan daerah. Dengan PAD yang memadai, suatu wilayah dapat menyalurkan dana untuk pembangunan fasilitas, infrastruktur, dan sarana publik, yang pada gilirannya meningkatkan realisasi belanja modal.

H2: PAD berpengaruh signifikan pada belanja modal.

Penerimaan Pembiayaan

Merujuk pada (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara PemPus dan PemDa, 2004) Penerimaan pembiayaan merujuk pada setiap jenis penerimaan yang harus dikembalikan, baik dalam tahun anggaran saat ini maupun pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. Pada Penelitian (Bungkes & Abdullah, 2016) penerimaan pembiayaan berdampak positif pada belanja modal Pemerintahan Kab./Kota di Aceh pada periode 2009-2013. Artinya, semakin besar penerimaan pembiayaan, semakin besar juga proporsi yang digunakan untuk belanja modal di kabupaten/kota.

H3: Penerimaan pembiayaan berpengaruh signifikan pada belanja modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Merujuk pada (PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019) SiLPA adalah selisih antara jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. Pada penelitian (Pika et al., 2018) SiLPA terbukti memberikan pengaruh positif terhadap realisasi belanja modal di Kab. atau kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Besarnya SiLPA mengindikasikan bahwa dengan SiLPA yang tinggi, belanja modal di daerah tersebut juga cenderung meningkat. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh (Purnama, 2014) mengungkapkan SiLPA tidak berdampak secara parsial dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal Pada Kab. dan Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013.

H4: SiLPA berpengaruh signifikan pada belanja modal.

Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Telah dinyatakan pada H1, H2, H3, dan H4 diambil hipotesis bahwa seluruh variabel x berpengaruh signifikan terhadap variabel y (belanja modal). Maka, secara simultan dapat diambil hipotesisnya yaitu DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.

H5: DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini meliputi seluruh provinsi yang terletak di Sumatera dan Jawa berjumlah 16 provinsi yang dimaksudkan untuk menganalisis DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, dan SiLPA yang mampu mempengaruhi belanja modal. Belanja modal, DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan dan SiLPA diukur dengan menggunakan satuan nominal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui website e-ppid.bpk.go.id yaitu LKPD *audited* dari BPK RI. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 80 didapatkan dari 16 provinsi dengan rentang waktu 5 tahun

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

(2018 s.d. 2022), dengan sampel 75. Metode penentuan sample dalam kajian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang berkriteria sebagai berikut :

1. Provinsi di seluruh Sumatera dan Jawa yang mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018 s.d. 2022.
2. Pemprov yang mempunyai kelengkapan data DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan dan SiLPA tahun anggaran 2018 s.d. 2022.

Dalam hal ini, DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Persamaannya digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = DAU

X2 = Pendapatan Asli Daerah

X3 = Penerimaan Pembiayaan

X4 = SiLPA

i = Provinsi

t = Waktu

e = Error Term (tingkatan kekeliruan praduga)

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini dibantu alat uji *Eviews 12* yang menggunakan metode analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi panel (uji CEM, FEM, REM), estimasi pemilihan model (uji Chow, Hausman, Lagrange Multiplier), dan uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, SiLPA dan Belanja Modal terlihat pada tabel 3 sebaagai berikut:

Tabel 3. Hasil Stastistik Deskriptif

	N	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev
X1	75	18,93	15,63	40,00	4,22	9,05
X2	75	134,87	144,37	232,49	59,06	5,62
X3	75	17,04	17,09	40,79	6,14	1,29
X4	75	16,65	12,36	40,79	4,68	1,649
Y	75	171,63	167,73	253,03	99,42	4,61

Sumber : Hasil Pengolahan data Output *Eviews 12*, 2024

tatistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki jumlah observasi sebanyak 75 data. Dana Alokasi Umum (DAU/X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 18,93 dengan simpangan baku tertinggi yaitu 9,05, yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD/X2) memiliki rata-rata sebesar 134,87 dan median 144,37, yang mengindikasikan distribusi data agak condong ke kiri (*left-skewed*), dengan simpangan baku 5,62. Penerimaan Pembiayaan (X3) memiliki rata-rata 17,04 dan median 17,09, menunjukkan distribusi yang cenderung simetris, serta memiliki simpangan baku yang rendah sebesar 1,29, menandakan tingkat keragaman data yang rendah. Sisa Lebih Pembiayaan

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Anggaran (SiLPA/X4) memiliki rata-rata 16,65 dengan median 12,36, menunjukkan kecenderungan distribusi condong ke kanan (right-skewed), dan simpangan baku sebesar 1,65. Sementara itu, variabel Belanja Modal (Y) memiliki rata-rata sebesar 171,63 dan median 167,73, dengan simpangan baku 4,61, yang mencerminkan distribusi data yang cukup simetris dan variasi yang sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki karakteristik distribusi dan tingkat penyebaran yang berbeda, yang akan memengaruhi interpretasi dalam analisis selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan tiga model estimasi dalam regresi data panel, yaitu model CEM, FEM, dan REM. Berdasarkan hasil pengujian chow diperoleh nilai *prob. Cross-section Chi-square* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, Dengan demikian, metode yang paling sesuai dalam penelitian ini serta teknik optimal untuk melakukan uji regresi adalah model efek tetap (FEM). Berdasarkan hasil uji hausman diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* sebesar $0,0232 < 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, metode yang tepat dalam penelitian ini dan teknik terbaik untuk melakukan uji regresi adalah model efek tetap (FEM). Matriks pemilihan pemodelan regresi data panel ditampilkan pada tabel 4.

Tabel 4. Matriks Pemilihan Pemodelan Regresi Data Panel

Pengujian	P-Value	Hasil
Uji Chow	0,0000	Terpilih Model FEM
Uji Hausman	0,0232	Terpilih Model FEM
Uji Lagrange Multiplier	-	-
Kesimpulan	Spesifikasi pada penelitian ini merupakan <i>Fixed Effect Pemodelan (FEM)</i>	

Sumber : Hasil Pengolahan data Output Eviews 12, 2024

Fixed Effect (FEM) memakai pendekatan *Ordinary Least Squared (OLS)* terhadap teknik estimasinya. Fungsi regresi populasi dan sampel biasanya di estimasi dengan metode estimasi *Ordinary Least Squared (OLS)*. Peruntukan model regresi data panel dengan pendekatan *Kuadrat Terkecil Biasa* atau dalam Bahasa Inggris disingkat OLS, tidak semua pengujian asumsi klasik wajib dipakai hanya dua pengujian asumsi klasik saja. Jika memakai lebih dari satu variabel bebas, uji heterokedastisitas dan multikolinearitas merupakan contoh pengujian asumsi klasik yang wajib dipakai sementara pengujian normalitas dan pengujian autokorelasi tidak wajib (opsional) untuk dibuat (Basuki & Prawoto, 2017: 297-298).

Tabel 5. Hasil Pengujian asumsi Klasik

Variable	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.834353	0.688045	0.691669
X2	0.834353	1.000000	0.727923	0.693246
X3	0.688045	0.727923	1.000000	0.849943
X4	0.691669	0.693246	0.849943	1.000000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.32E+1	2.03E+11	3.107673	0.0030
X1	-0.034303	0.065390	-0.524589	0.6019
X2	-0.067312	0.027206	-2.474186	0.0164

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

X3	0.013692	0.039752	0.344429	0.7318
X4	0.022233	0.049350	0.450529	0.6541

Sumber : Hasil Pengolahan data Output Eviews 12, 2024

Pengujian multikolinearitas menghasilkan nilai X1 & X2 sekitar $0,834353 < 0,85$, X1 & X3 sekitar $0,688045 < 0,85$, X1 & X4 sekitar $0,691669 < 0,85$, X2 & X3 sekitar $0,727923 < 0,85$, X2 & X4 sekitar $0,693246 < 0,85$, X3 & X4 sekitar $0,849943 < 0,85$ hingga semua variabel tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian Pengujian Heteroskedastisitas memiliki Nilai-Prob. X1 $0,6019 > 0,05$, Nilai-Prob. X2 sekitar $0,0164 < 0,05$, Nilai-Prob. X3 $0,7318 > 0,05$, Nilai-Prob. X4 $0,6541 > 0,05$ 3 variabel terbebas dari heteroskedastisitas, 1 variabel tanpa terbebas heteroskedastisitas namun, grafik residual belum mencapai 500 ataupun -500 maka pemodelan regresi tanpa terdapat masalah heteroskedastisitas Jika grafik residual tidak melewati batas (500 dan -500), yang berarti varian residual sama. Oleh karena itu, tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas atau data berhasil lolos dari uji heteroskedastisitas. (Napitupulu, dkk. 2021).

Regresi data panel dipakai memberitahukan adanya ataupun tanpanya pengaruh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap variabel terikat yaitu Belanja modal. Persamaan regresi data panel terhadap berikut:

$$Y = 6,46 + 0,10 X_1 + 0,04 X_2 + 0,07 X_3 + 0,12 X_4$$

Pada penilaian konstanta 6,46, variabel Belanja Pemodalan (Y) akan mengalami meningkatkan sekitar 646% tanpaadanya variabel DAU (X1), PAD (X2), PP (X3), dan SiLPA (X4). Koefisien beta variabel DAU (X1) merupakan 0,10 ataupun sekitar 10%, koefisien beta variabel PAD (X2) merupakan 0,04 ataupun sekitar 4% Menerima biaya (X3) sekitar 0,07. Jika nilai variabel lain tanpa berubah dan variabel X3 meningkat 7%, maka variabel Y akan kehilangan 7% karena SiLPA (X4) sekitar 0,12. Sebaliknya, jika nilai variabel lain tanpa berubah dan variabel X4 meningkat 12%, maka variabel Y akan kehilangan 12%.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinansi (R²), Uji *Statistic-t* dan Uji F

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.44E+11	4.11E+11	1.079129	0.2852
X1	0.138654	0.132203	1.048794	0.2988
X2	0.111595	0.055003	2.028876	0.0472
X3	-0.033141	0.080370	-0.412361	0.6816
X4	-0.041633	0.099773	0.417280	0.6781

Effect Spesification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-Squared	0.865310	Mean dependent var	1.30E+12
Adjusted R-Squared	0.822017	S.D. dependent var	7.31E+11
S.E. of regression	3.08E+11	Akaike info criterion	55.96200
Sum squared resid	5.33E+24	Schwarz criterion	56.54910

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Log likelihood	-20179.575	Hannan-Quinn Criter	56.19643
F-Statistic	19.98722	Durbin-Watson stat	2.027766
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan data Output Eviews 12, 2024

Nilai *Adjusted R-squared* sekitar 0,822017. Berarti, sekitar 82,2% faktor faktor yang mempengaruhi belanja pemodalanan bisa menjelaskan pada variabel independen yaitu DAU, PAD, Menerima biaya, dan SiLPA, sementara bersisa yaitu sebesar 17,8% menjelaskan pada variabel lain yang tanpa dimasukkan didalam penelitian ini. Kemudian, Hasil pengujian *statistic-t* pada variabel DAU (X1),sekitar $1,048794 < 1,994437$, dan nilai signifikansi sekitar $0,2988 > 0,05$, PAD (X2), sekitar $2,028876 > 1,994437$, dan nilai signifikansi sekitar $0,0472 < 0,05$. Menerima biaya (X3) sekitar $-0,412361 < 1,994437$, dan nilai signifikansi sekitar $0,3882 > 0,05$. SiLPA (X4) sekitar $-0,417280 < 1,994437$, dan nilai signifikansi sekitar $0,6781 > 0,05$. Hingga hasil statistik-t ditunjukkan jika anggaran asli daerah mempengaruhi dan signifikan terhadap belanja pemodalanan sementara DAU, PP dan SiLPA tanpa mempengaruhi terhadap belanja pemodalanan. Dan F hitung sekitar 19,98722 pada penilaian *Probability (F-statistic)* sekitar 0,000000. F tabel sebesar 2,502656. nilai signifikansi yaitu $0,000000 < 0,05$ yang berarti DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, dan SiLPA secara simultan mempengaruhi terhadap Belanja modal.

DAU (X1) terhadap belanja modal yang memperlihatkan nilai t hitung yang secara signifikan lebih rendah daripada nilai t tabel ($1,048794 < 1,994437$) pada penilaian signifikansi buat variabel dana alokasi umum sekitar 0,2988 dan nilai taraf signifikansi sekitar 0,05 ($0,2988 > 0,05$). Jadi, didapatkan kesimpulan jika didalam penelitian ini H1 menolak dan H0 menerima. Berarti, variabel DAU tidak mempengaruhi terhadap belanja modal pada provinsi di Sumatera dan Jawa. Hasil kajian yang dilakukan oleh (Syahdila Putri et al., 2021) memperoleh hasil serupa yaitu DAU tidak ada pengaruhnya terhadap belanja modal. Namun, penelitian ini tidak menghasilkan temuan yang serupa dengan penelitian (Kuntari et al., 2019) yang mengungkapkan DAU mempengaruhi pergerakan naik turun belanja modal.

PAD (X2) terhadap belanja modal yang mempunyai *value t*-hitung sangat besar dibanding nilai t-tabel ($2,028876 > 1,994437$) pada penilaian signifikansi buat variabel anggaran asli daerah sekitar 0,0472 dan nilai taraf signifikansi sekitar 0,05 ($0,0472 < 0,05$), maka didapatkan kesimpulan jika didalam penelitian ini H0 menolak dan H2 menerima. Berarti, variabel anggaran asli daerah mempengaruhi positif serta signifikan terhadap belanja pemodalanan di provinsi di Sumatera dan Jawa. Hasil didalam penelitian ini menghasilkan temuan yang serupa dengan penelitian (Ishak et al., 2021) yang dinyatakan jika PAD dibuktikan mempengaruhi positif terhadap belanja modal di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022) juga diungkapkan jika PAD mempengaruhi positif serta signifikan terhadap belanja modal di Kab/Kota Provinsi JaBar Tahun 2019 s.d. 2021, hal ini berarti PAD dijadikan salah satu faktor yang dipakai buat belanja pemodalanan.

Penerimaan Pembiayaan (X3) terhadap belanja pemodalanan yang mempunyai nilai t hitung sangat besar daripada nilai t tabel ($-0,412361 < 1,994437$) pada penilaian signifikansi buat variabel menerima biaya sekitar 0,3882 dan nilai taraf signifikansi sekitar 0,05 ($0,3882 > 0,05$), maka didapatkan kesimpulan jika didalam penelitian ini H0 menerima dan H3 menolak. Berarti, variabel menerima biaya tanpa mempengaruhi terhadap belanja pemodalanan di provinsi di Sumatera dan Jawa. Hasil

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

didalam penelitian ini tidak menghasilkan temuan yang serupa dengan penelitian yang dibuat (Bungkes & Abdullah, 2016) yang mengungkap jika penerimaan pembiayaan mempengaruhi terhadap belanja pemodal.

SiLPA (X4) terhadap belanja pemodal yang mempunyai nilai t hitung sangat besar daripada nilai t table ($-0,417280 < 1,994437$) pada penilaian signifikansi buat variabel SiLPA sekitar 0,6781 dan nilai taraf signifikansi sekitar 0,05 ($0,6781 > 0,05$), maka didapatkan kesimpulan jika didalam penelitian ini H_0 menerima dan H_4 menolak. Berarti, variabel SiLPA tanpa mempengaruhi terhadap belanja pemodal di provinsi di Sumatera dan Jawa. Hasil didalam penelitian ini memperoleh hasil serupa dengan penelitian (Purnama, 2014) yang diungkapkan jika SiLPA tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Pemodal.

Hasil pengujian simultan dengan dibuat Uji Statistik-F, bisa diketahui jika nilai F hitung sekitar 19,98722 pada penilaian *Probability (F-statistic)* sekitar 0,000000. Lalu hasil yang diperbuat buat F tabel yaitu sekitar 2,502656. Dikarenakan nilai F hitung $>$ nilai F tabel ($19,98722 > 2,502656$) maka H_a menerima. Didasarkan signifikansi, nilai signifikansi pada uji *statistic-F* $< 0,05$, yaitu sekitar 0,000000 ($0,000000 < 0,05$), maka H_0 menolak H_5 diterima. Jadi, didapatkan kesimpulan jika DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, Dan SiLPA secara simultan (bersamaan) mempengaruhi dan signifikansi terhadap belanja modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada analisis dan pembahasan yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan DAU, PAD, Penerimaan Pembiayaan, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa. DAU, PAD, dan SiLPA secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa. Namun, hanya PAD yang berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan maka peneliti menyarankan bagi Pemda setempat untuk meningkatkan dan mempertahankan penggunaan PAD dengan mengoptimalkan potensi daerah. Selain itu, mereka harus memaksimalkan penggunaan DAU, penerimaan pembiayaan, dan SiLPA, terutama untuk Belanja Modal. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana hanya terdiri dari 16 provinsi dengan pengecualian 1 provinsi hal tersebut tentu akan mempengaruhi hasil penelitian jika lokasi penelitian diperluas. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya sebagai langkah lanjutan, penelitian dapat diperluas untuk mencakup seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan variabel tambahan yang belum dipertimbangkan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih Setya Ningrum, D., Mellita, D., & Sartika, D. (2024). Factors affecting capital expenditure in provincial governments in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- Bungkes, P., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri Dan Penerimaan Pembiayaan Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh). *Magister Akuntansi, Jurnal Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 50–59.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

- Basuki, A.T., & Prawoto, N. 2017. Analisis regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews (2nd ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dinah, L. S., & Darsono. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* , 12(3), 1–13.
- E-ppid BPK available online: <https://e-ppid.bpk.go.id/> (accessed on May 31, 2024).
- Ishak, J. F., Sari, Y. P., Dwitayanti, Y., & Mauluddi, H. A. (2021). The Determinant Factors of Capital Expenditure. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting (IJTC)*, 2(2), 158–165. <https://www.ilomata.org/index.php/ijtc>
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- Kuntari, Y., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2019). *Capital Expenditure Of Local Governments*. <https://www.researchgate.net/publication/335338150>
- Maria, M., Indriasari, D., Nurhasanah, N., & Akuntansi, J. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1).
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik H., Harianja, H., Sirait R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis, teknik, dan analisa dengan SPSS-STATAEViews. I ed. Madenatera.
- Pika, Saiful, & Aprila, N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *Jurnal Fairness*, 8(2), 125–140.
- Pradita, R. R. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Prayitno, B., Wany, E., & Abidin, K. (2024). The Influence Of Regional Income, General Allocation Funds and Revenue Sharing Funds On The Allocation Of Capital Expenditures With Economic Growth As A Moderating Variable In Governments East Java Province 2019-2022. In *Jurnal Riset Ilmiah* (Vol. 3, Issue 1).
- Purnama, A. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013. *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sania Twinki, B., & Retno Widiyanti, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 2(3). <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.03>
- Syahdila Putri, A., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 3(2).
- Zulkifli, Z., Martini, R., Mahira, I., Maja, I., & Aryanti, Y. A. (2024). *Is Regional Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds in South Sumatra Influencing Capital Expenditure?* (pp. 53–57). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-220-0_7
- _____.2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Available online:

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004> (accessed on May 31, 2024)

_____.2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Available online: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (accessed on May 31, 2024)

_____.2015. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Membangun Jangka Menengah Nasional. Available online: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41718/> (accessed on May 31, 2024)

_____.2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Available online: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019> (accessed on May 31, 2024)